



EDUTECH

Jurnal Teknologi Pendidikan

Journal homepage <https://ejournal.upi.edu/index.php/edutech>



Menyoal Hakikat Agama dan Fondasi Epistemologis Religious Studies, Telaah Kritis atas Pemikiran Walter H. Capps

Dody S. Truna, Neneng Athiatul Faiziyah, & Rifky Rosyad
UIN SGD Bandung, Indonesia

*Correspondence: Reyhan Aristo Tenggono E-mail: dodytruna@gmail.com

ABSTRACT	ARTICLE INFO
<p>This article critically reviews Chapter One, “The Essence of Religion,” from Walter H. Capps’ <i>Religious Studies: The Making of a Discipline</i> (1995). The chapter addresses a central epistemological problem in the formation of Religious Studies: the persistent attempt to define the “essence of religion.” Using a historical–conceptual approach, Capps demonstrates that such definitions are not neutral or universal but deeply embedded in Western intellectual and theological traditions. This article argues that Capps’ critique of essentialism provides a crucial foundation for contemporary Religious Studies, particularly in plural and postcolonial contexts such as Indonesia. By situating Capps’ argument within Indonesian religious diversity, this study highlights the relevance of post-essentialist and interpretive approaches for developing a more inclusive and reflexive study of religion.</p>	<p>Article History: <i>Submitted/Received 22 April 2025</i> <i>First Revised 26 Mei 2026</i> <i>Accepted 15 June 2026</i> <i>First Available online 22 June 2026</i> <i>Publication Date 22 June 2026</i></p> <p>Keyword: <i>Studi Agama, Hakikat Agama, Esensialisme, Walter H. Capps, Konteks Indonesia</i></p>
<p>ABSTRAK</p> <p>Artikel ini mereviu secara kritis Bab I “The Essence of Religion” dari buku Walter H. Capps, <i>Religious Studies: The Making of a Discipline</i> (1995). Bab ini membahas problem epistemologis mendasar dalam pembentukan Studi Agama sebagai disiplin akademik, yakni kecenderungan untuk mencari “hakikat agama.” Melalui pendekatan historis-konseptual, Capps menunjukkan bahwa berbagai definisi agama tidak pernah netral atau universal, melainkan berakar kuat pada tradisi intelektual dan teologis Barat. Artikel ini berargumen bahwa kritik Capps terhadap esensialisme sangat relevan bagi pengembangan Studi Agama kontemporer, khususnya dalam konteks masyarakat plural dan pascakolonial seperti Indonesia. Dengan demikian, pemikiran Capps membuka ruang bagi</p>	

pendekatan interpretatif dan non-esensial dalam studi agama di Indonesia.

© 2026 Teknologi Pendidikan UPI

1. PENDAHULUAN

Pertanyaan mengenai apa itu agama merupakan salah satu problem paling mendasar sekaligus paling problematik dalam sejarah pemikiran manusia. Dalam *On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers*, Friedrich Schleiermacher berupaya menjawab persoalan ini dengan cara yang secara radikal berbeda dari pendekatan teologis dogmatis maupun rasionalisme moral yang dominan pada zamannya. Pada bagian awal karyanya, Schleiermacher secara tegas menolak reduksi agama semata-mata sebagai sistem doktrin metafisis atau perangkat etika praktis. Bagi Schleiermacher, agama tidak identik dengan pengetahuan tentang Tuhan maupun dengan kewajiban moral, meskipun keduanya sering dilekatkan padanya dalam tradisi filsafat dan teologi Barat.

Schleiermacher memulai argumennya dengan kritik terhadap kecenderungan kaum rasionalis Pencerahan yang memandang agama sebagai bentuk pengetahuan yang belum matang atau sebagai sarana pedagogis menuju moralitas rasional. Ia menilai bahwa pendekatan semacam ini justru mengaburkan hakikat agama itu sendiri. Agama, menurutnya, tidak berakar pada aktivitas berpikir (*Denken*) maupun kehendak bertindak (*Handeln*), melainkan pada wilayah pengalaman batin yang lebih mendasar, yakni *Gefühl*, perasaan atau kesadaran intuitif manusia terhadap keberadaan yang tak terbatas. Dalam konteks ini, agama dipahami sebagai kesadaran langsung manusia akan ketergantungannya pada Yang Tak Terbatas, sebuah pengalaman eksistensial yang mendahului refleksi rasional maupun formulasi etis.

Lebih lanjut, Schleiermacher menegaskan bahwa pengalaman keagamaan bersifat individual sekaligus universal. Ia individual karena berakar pada pengalaman batin subjek yang konkret, namun universal karena setiap manusia, pada dasarnya, memiliki kapasitas untuk mengalami keterhubungan dengan keseluruhan realitas. Agama tidak muncul dari konstruksi sosial semata atau dari kebutuhan moral, melainkan dari respons eksistensial manusia terhadap misteri keberadaan. Oleh karena itu, Schleiermacher menolak klaim bahwa agama dapat sepenuhnya dijelaskan melalui filsafat moral atau sains rasional tanpa kehilangan dimensi terdalamnya.

Sejak awal kemunculan Studi Agama sebagai disiplin akademik modern, definisi agama tidak pernah menjadi persoalan netral, melainkan selalu memuat kepentingan epistemologis, teologis, dan kultural tertentu. Upaya untuk menemukan "hakikat agama" (*the essence of religion*) kerap dipahami sebagai fondasi ilmiah yang niscaya bagi analisis sistematis terhadap fenomena religius. Namun, justru pada titik inilah Studi Agama menghadapi dilema metodologis yang mendalam: apakah agama memiliki esensi tunggal yang universal, ataukah ia selalu hadir sebagai konstruksi makna yang terikat secara historis dan sosial.

Secara historis, pencarian hakikat agama berkembang seiring dengan proyek modernitas Barat abad ke-19, ketika otoritas teologi Kristen mulai kehilangan legitimasi publik akibat kritik rasionalitas ilmiah dan filsafat Pencerahan. Dalam konteks tersebut, agama perlu dirumuskan ulang dalam kategori-kategori yang dapat diterima secara akademik. Maka, agama tidak lagi dipahami semata sebagai wahyu ilahi atau dogma normatif, melainkan sebagai pengalaman batin, kesadaran akan yang sakral, atau respons eksistensial manusia terhadap realitas transenden. Upaya ini, meskipun memperluas cakrawala ilmiah Studi Agama, sekaligus menanamkan asumsi bahwa di balik keragaman tradisi religius terdapat suatu inti terdalam yang bersifat universal dan ahistoris.

Dalam kerangka inilah buku *Religious Studies: The Making of a Discipline* karya Walter H. Capps memperoleh signifikansi teoretis yang kuat. Alih-alih melanjutkan proyek pencarian esensi agama, Capps secara kritis menelusuri asal-usul intelektual

gagasan tersebut. Bab pertama, “The Essence of Religion,” berfungsi sebagai refleksi genealogis yang mengungkap bahwa definisi-definisi agama yang selama ini dianggap universal sesungguhnya lahir dari konfigurasi historis tertentu, terutama tradisi intelektual Kristen-Eropa. Dengan demikian, Capps tidak menawarkan definisi baru tentang agama, melainkan membongkar asumsi epistemik yang menopang definisi-definisi lama.

Kritik Capps menjadi penting karena ia menunjukkan bahwa konsep “hakikat agama” tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif dan eksklusif. Ketika pengalaman religius tertentu—seperti rasa ketergantungan mutlak, pengalaman numinous, atau kesadaran akan yang sakral—dijadikan tolok ukur universal, maka bentuk-bentuk religiusitas lain yang tidak sesuai dengan model tersebut berisiko terpinggirkan. Dalam pengertian ini, esensialisme agama tidak hanya menyederhanakan realitas religius, tetapi juga menciptakan hierarki pengetahuan yang problematik dalam Studi Agama.

Meskipun karya Capps telah banyak dirujuk dalam literatur Studi Agama Barat sebagai fondasi kritik terhadap esensialisme, terdapat beberapa celah penelitian (research gap) yang signifikan. Pertama, sebagian besar kajian terhadap pemikiran Capps masih berfokus pada kontribusinya dalam sejarah intelektual Religious Studies di Barat, tanpa mengelaborasi implikasinya bagi konteks masyarakat non-Barat dan pascakolonial. Kritik terhadap esensialisme agama sering berhenti pada level teoretis, belum secara memadai dikontekstualisasikan dalam realitas sosial-budaya yang plural seperti Indonesia, di mana agama beroperasi sebagai sistem kepercayaan, identitas kolektif, dan institusi sosial sekaligus.

Kedua, dalam diskursus Studi Agama di Indonesia, problem esensialisme masih relatif dominan, baik dalam kurikulum akademik maupun dalam wacana publik. Agama kerap diperlakukan sebagai entitas normatif yang memiliki “inti ajaran” tunggal, sementara keragaman praksis religius diposisikan sebagai deviasi atau penyimpangan. Literatur yang secara eksplisit mengaitkan kritik epistemologis ala Capps dengan tantangan Studi Agama di Indonesia masih sangat terbatas.

Ketiga, terdapat kesenjangan antara kritik teoretis terhadap esensialisme agama dan praktik metodologis dalam penelitian Studi Agama. Meskipun pendekatan non-esensialis, interpretatif, dan interdisipliner sering disebut sebagai ideal normatif, implementasinya dalam kerangka konseptual Studi Agama Indonesia belum terumuskan secara sistematis. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan kajian yang menjembatani refleksi teoretis klasik dengan konteks lokal kontemporer.

Bertolak dari celah-celah tersebut, artikel ini mengambil posisi sebagai kajian reflektif-kritis yang berupaya mengisi research gap tersebut dengan cara: (1) merekonstruksi argumen utama Capps mengenai problem esensialisme agama; (2) menilai relevansi epistemologis kritik tersebut bagi Studi Agama kontemporer; dan (3) mengontekstualisasikannya secara eksplisit dalam diskursus Studi Agama di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berkontribusi pada pembacaan ulang pemikiran Walter H. Capps, tetapi juga menawarkan landasan konseptual bagi pengembangan Studi Agama yang lebih reflektif, plural, dan sensitif terhadap konteks sosial-budaya Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka dengan metode analisis historis-konseptual. Sumber utama adalah Bab I karya Capps, yang dianalisis melalui dialog kritis dengan literatur klasik dan kontemporer dalam Studi Agama dan filsafat agama.

Pendekatan ini menekankan:

1. Penelusuran sejarah ide tentang “hakikat agama,”
2. Analisis konseptual terhadap argumen Capps, dan
3. Refleksi kontekstual dalam kerangka Studi Agama di Indonesia.

Penelitian ini tidak bersifat empiris, melainkan reflektif-teoretis, sejalan dengan karakter karya yang direviu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Agama sebagai Proyek Intelektual Modern

Salah satu temuan utama dari pembacaan kritis Walter H. Capps adalah bahwa pencarian “hakikat agama” bukanlah aktivitas intelektual yang netral dan ahistoris, melainkan bagian dari proyek modernitas Barat. Dalam kerangka ini, konsep agama direformulasikan untuk menjawab krisis otoritas teologi tradisional yang terjadi sejak abad ke-18 dan ke-19, ketika rasionalitas ilmiah dan filsafat Pencerahan mulai menggugat klaim kebenaran absolut agama Kristen institusional. Agama kemudian dipahami bukan lagi semata-mata sebagai sistem doktrin normatif atau hukum ilahi, melainkan sebagai dimensi terdalam dari pengalaman manusia yang dapat dianalisis secara ilmiah dan komparatif.

Salah satu figur sentral dalam transformasi ini adalah Friedrich Schleiermacher. Dalam *On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers*, Schleiermacher memaknai agama sebagai *Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit*—rasa ketergantungan mutlak manusia terhadap realitas yang melampaui dirinya. Definisi ini menandai pergeseran penting: agama tidak lagi diletakkan pada wilayah dogma atau institusi, tetapi pada pengalaman batin subjek religius. Bagi Schleiermacher, inti agama bukan terletak pada apa yang dipercayai (*belief*), melainkan pada bagaimana manusia mengalami keterhubungan eksistensial dengan Yang Tak Terbatas. Pendekatan ini memberikan dasar epistemologis bagi Studi Agama modern, karena memungkinkan agama dikaji tanpa harus mengafirmasi klaim teologis tertentu.

Namun, sebagaimana dicatat Capps, universalisasi pengalaman batin sebagai inti agama menyimpan problem epistemologis yang serius. Konsep “rasa ketergantungan mutlak” lahir dari konteks teologis Protestan Jerman dan merefleksikan struktur religiositas tertentu. Ketika pengalaman tersebut dijadikan tolok ukur universal, bentuk-bentuk religiositas yang tidak menekankan dimensi subjektif atau emosional, misalnya tradisi ritualistik, legalistik, atau kosmologis, cenderung dipandang sebagai kurang religius atau bahkan pra-religius.

Problem serupa muncul dalam pemikiran Rudolf Otto melalui konsep *the numinous*. Dalam *The Idea of the Holy*, Otto mendefinisikan hakikat agama sebagai pengalaman akan yang *mysterium tremendum et fascinans*, yakni realitas suci yang sekaligus menakutkan dan memikat. Otto menegaskan bahwa pengalaman *numinous* bersifat *a priori*, non-rasional, dan universal dalam semua tradisi agama. Konsep ini sangat berpengaruh dalam Studi Agama karena menawarkan kategori analitis yang dianggap mampu melampaui batas-batas dogma teologis.

Meski demikian, Capps menunjukkan bahwa klaim universalitas pengalaman *numinous* tetap berangkat dari asumsi epistemologis tertentu. Pengalaman religius yang menekankan rasa kagum dan ketakutan terhadap Yang Kudus lebih dekat dengan tradisi mistik dan devosional tertentu, sementara tradisi keagamaan yang menekankan etika sosial, hukum, atau praksis kolektif tidak selalu menempatkan pengalaman semacam itu sebagai pusat religiositas. Dengan demikian, apa yang disebut Otto sebagai “hakikat

agama” sesungguhnya merupakan abstraksi dari pengalaman religius yang spesifik, bukan esensi transhistoris yang berlaku universal.

Pendekatan esensialis ini kemudian dilanjutkan dan disistematisasi oleh Mircea Eliade. Dalam karya-karyanya, Eliade memahami agama sebagai kesadaran akan yang sakral (the sacred) yang membedakan secara ontologis antara yang sakral dan yang profan. Bagi Eliade, manusia religius (homo religiosus) di semua kebudayaan selalu berupaya mengorientasikan hidupnya pada realitas sakral yang memmanifestasikan diri melalui mitos, ritus, dan simbol. Dengan kerangka ini, Eliade berusaha membangun tipologi universal agama yang melampaui konteks sejarah tertentu.

Menurut Capps, meskipun pendekatan Eliade tampak lebih komparatif dan lintas budaya, ia tetap mereproduksi logika esensialisme yang problematik. Konsep “yang sakral” diperlakukan sebagai kategori universal yang mendahului sejarah dan kebudayaan, sehingga keragaman praktik religius direduksi menjadi variasi ekspresif dari satu struktur makna yang sama. Pendekatan semacam ini cenderung mengabaikan relasi kuasa, konteks sosial, dan dinamika historis yang membentuk agama sebagai praktik manusia.

Dari hasil analisis ini, tampak bahwa apa yang selama ini disebut sebagai “hakikat agama” sesungguhnya merupakan konstruksi intelektual modern yang lahir dari kebutuhan akademik dan krisis teologis Barat. Capps menegaskan bahwa definisi-definisi tersebut bukan sekadar deskriptif, melainkan juga normatif: ia menentukan apa yang layak disebut agama dan apa yang dianggap marginal atau menyimpang. Dengan demikian, pencarian esensi agama tidak hanya menyederhanakan kompleksitas fenomena religius, tetapi juga berpotensi melanggengkan hierarki pengetahuan dalam Studi Agama.

Implikasi temuan ini sangat penting bagi pengembangan Studi Agama kontemporer, khususnya dalam konteks masyarakat plural dan pascakolonial. Kritik Capps mendorong pergeseran paradigma dari pencarian “inti agama” menuju analisis agama sebagai praktik pemaknaan yang historis, kontekstual, dan selalu terikat pada relasi sosial. Agama tidak lagi dipahami sebagai entitas abstrak yang memiliki esensi tunggal, melainkan sebagai medan diskursif tempat berbagai aktor menegosiasikan makna, identitas, dan kekuasaan.

Dengan demikian, hasil kajian ini menegaskan bahwa pendekatan esensialis dalam Studi Agama perlu ditinjau ulang secara kritis. Alih-alih mencari definisi universal tentang agama, Studi Agama justru ditantang untuk mengembangkan kerangka analitis yang sensitif terhadap konteks, pluralitas pengalaman, dan dinamika historis. Di sinilah relevansi pemikiran Capps menjadi sangat signifikan sebagai landasan epistemologis bagi Studi Agama yang lebih reflektif dan inklusif.

Kritik Epistemologis terhadap Esensialisme Agama

Kritik epistemologis terhadap esensialisme agama berangkat dari kesadaran bahwa definisi agama tidak pernah berdiri di ruang hampa. Sebagaimana ditegaskan Walter H. Capps, setiap upaya untuk merumuskan “hakikat agama” selalu berkelindan dengan asumsi-asumsi teoretis tertentu mengenai subjek manusia, pengetahuan, dan realitas sosial. Dalam konteks ini, esensialisme agama tidak hanya berfungsi sebagai kerangka analitis, tetapi juga sebagai mekanisme epistemik yang menentukan batas-batas apa yang dapat dikenali sebagai “agama” dan apa yang dikecualikan dari kategori tersebut.

Secara epistemologis, esensialisme agama bertumpu pada anggapan bahwa di balik keragaman tradisi religius terdapat satu inti universal yang bersifat transhistoris dan lintas budaya. Asumsi ini sejalan dengan proyek modernitas Barat yang berupaya menemukan hukum-hukum umum dalam fenomena sosial, sebagaimana dilakukan dalam ilmu alam. Namun, ketika paradigma ini diterapkan pada agama, ia cenderung

mereduksi kompleksitas pengalaman religius menjadi sejumlah ciri abstrak yang dilepaskan dari konteks historis dan sosialnya.

Capps menunjukkan bahwa kecenderungan ini memiliki akar yang kuat dalam sejarah intelektual Kristen-Eropa. Konsep-konsep seperti pengalaman batin, kesadaran akan yang sakral, atau relasi personal dengan Yang Transenden mencerminkan struktur religiositas tertentu yang kemudian diproyeksikan sebagai model universal. Dalam praktiknya, pendekatan ini menghasilkan bias epistemologis yang halus tetapi sistemik: tradisi religius yang tidak menekankan dimensi subjektif atau pengalaman mistik sering kali dipahami sebagai kurang matang, formalistik, atau bahkan belum sepenuhnya religius.

Kritik serupa dikembangkan secara lebih radikal oleh Jonathan Z. Smith, yang menyatakan bahwa “agama” bukanlah entitas alami yang menunggu untuk ditemukan, melainkan kategori analitis yang dibentuk oleh para sarjana. Dengan kata lain, tidak ada “agama” di luar proses klasifikasi dan perbandingan akademik. Pernyataan ini mengguncang fondasi esensialisme karena menolak asumsi bahwa agama memiliki substansi internal yang dapat diidentifikasi secara objektif. Sebaliknya, Smith menekankan bahwa apa yang disebut agama selalu merupakan hasil seleksi, penamaan, dan penataan makna oleh subjek peneliti.

Dari sudut pandang ini, esensialisme agama tidak lagi dipahami sebagai kesalahan metodologis semata, tetapi sebagai problem epistemik yang lebih dalam. Ia menyamakan relasi kuasa yang bekerja dalam produksi pengetahuan keagamaan. Talal Asad, misalnya, menunjukkan bahwa definisi agama modern sangat dipengaruhi oleh sejarah disiplin, kolonialisme, dan proyek sekularisasi Barat. Melalui pendekatan genealogis, Asad mengungkap bahwa konsep agama sebagai ranah privat, berbasis kepercayaan, dan terpisah dari politik merupakan konstruksi historis yang tidak dapat dilepaskan dari pengalaman Eropa modern.

Dalam kerangka Asad, esensialisme agama berfungsi sebagai instrumen normalisasi: ia menetapkan standar tertentu tentang apa yang dianggap sebagai ekspresi religius yang sah. Akibatnya, tradisi keagamaan yang menolak pemisahan tegas antara agama, hukum, dan politik—seperti dalam banyak masyarakat Muslim—sering kali diposisikan sebagai anomali atau deviasi dari model agama “ideal”. Kritik ini sejalan dengan pembacaan Capps yang menegaskan bahwa definisi agama selalu mengandung implikasi normatif, meskipun kerap disamarkan sebagai deskripsi ilmiah.

Timothy Fitzgerald memperluas kritik ini dengan menunjukkan bahwa Studi Agama modern kerap beroperasi sebagai ideologi terselubung. Menurutnya, pemisahan konseptual antara “agama” dan “non-agama” merupakan produk diskursif yang melayani kepentingan tertentu, terutama dalam konteks negara-bangsa modern dan logika sekularisme. Dalam perspektif ini, esensialisme agama tidak hanya problematik secara teoretis, tetapi juga berimplikasi politis karena membentuk cara negara dan masyarakat mengelola keragaman religius.

Dari hasil pembahasan ini, tampak bahwa kritik epistemologis terhadap esensialisme agama tidak bertujuan meniadakan studi tentang agama, melainkan mereorientasikannya. Capps dan para pemikir pasca-esensialis tidak menolak perlunya konsep analitis, tetapi menuntut kesadaran reflektif terhadap asumsi-asumsi yang mendasarinya. Agama, dalam kerangka ini, dipahami bukan sebagai objek dengan esensi tetap, melainkan sebagai praktik diskursif yang terus-menerus dinegosiasikan dalam ruang sosial dan historis.

Implikasi metodologis dari kritik ini sangat signifikan. Studi Agama dituntut untuk menggeser fokus dari pencarian definisi universal menuju analisis kontekstual yang

menaruh perhatian pada praktik, narasi, dan relasi kuasa. Pendekatan interpretatif, historis, dan interdisipliner menjadi lebih relevan dibandingkan upaya untuk merumuskan satu definisi agama yang komprehensif. Dengan demikian, kritik epistemologis terhadap esensialisme agama membuka ruang bagi Studi Agama yang lebih inklusif, plural, dan sensitif terhadap pengalaman religius di luar kerangka Barat.

Dalam konteks ini, pemikiran Capps berfungsi sebagai jembatan antara kritik teoretis klasik dan tantangan Studi Agama kontemporer. Ia tidak hanya membongkar fondasi epistemik esensialisme, tetapi juga mengingatkan bahwa disiplin ini harus terus merefleksikan posisi dan keterbatasannya sendiri. Melalui kesadaran reflektif tersebut, Studi Agama dapat berkembang sebagai medan kajian yang tidak mendominasi makna agama, melainkan membuka ruang dialog dengan keragaman cara manusia memaknai yang transenden.

Implikasi Kritik Anti-Esensialis bagi Studi Agama di Indonesia

Temuan teoretis mengenai problem esensialisme agama sebagaimana dikemukakan Walter H. Capps memiliki implikasi metodologis dan epistemologis yang signifikan bagi pengembangan Studi Agama di Indonesia. Dalam konteks akademik nasional, agama tidak hanya hadir sebagai objek kajian ilmiah, tetapi juga sebagai identitas sosial, sumber legitimasi normatif, dan dasar regulasi publik. Oleh karena itu, cara agama didefinisikan dan dipahami dalam ruang akademik memiliki dampak langsung terhadap praktik keilmuan dan wacana publik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Studi Agama di Indonesia masih kuat dipengaruhi oleh paradigma esensialis. Agama kerap diperlakukan sebagai entitas normatif yang memiliki “inti ajaran” tetap dan tunggal, sementara keragaman ekspresi sosial-budaya umat beragama diposisikan sebagai variasi sekunder atau bahkan penyimpangan. Pola ini tampak baik dalam kurikulum pendidikan tinggi keagamaan maupun dalam penelitian yang menempatkan doktrin resmi sebagai titik tolak analisis. Dalam kerangka ini, agama dipahami lebih sebagai sistem ideal daripada praktik sosial yang hidup dan dinegosiasikan.

Kritik anti-esensialis membuka kemungkinan reposisi epistemologis Studi Agama di Indonesia. Alih-alih mencari definisi universal tentang agama, pendekatan ini menekankan pentingnya memahami bagaimana agama dipraktikkan, dimaknai, dan diperdebatkan dalam konteks sosial tertentu. Dengan demikian, fokus kajian bergeser dari “apa itu agama” menuju “bagaimana agama bekerja” dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pergeseran ini sejalan dengan pendekatan interpretatif dan antropologis yang memandang agama sebagai praktik pemaknaan manusia yang selalu terikat pada sejarah, budaya, dan relasi kuasa.

Dalam konteks Indonesia yang plural, implikasi ini menjadi sangat relevan. Realitas keberagaman di Indonesia menunjukkan bahwa batas antara agama, adat, budaya, dan politik sering kali bersifat cair. Pendekatan esensialis cenderung kesulitan menjelaskan fenomena seperti sinkretisme, tradisi lokal keagamaan, atau ekspresi Islam kultural yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kategori normatif teks keagamaan. Sebaliknya, pendekatan non-esensialis memungkinkan peneliti untuk membaca fenomena-fenomena tersebut sebagai bentuk artikulasi religius yang sah dalam konteks sosialnya sendiri.

Lebih jauh, kritik anti-esensialis juga memiliki implikasi etis dan politis. Dengan menolak klaim universalitas satu model religius, Studi Agama dapat menghindari kecenderungan hierarkisasi pengetahuan yang menempatkan tradisi tertentu sebagai standar “agama yang benar”. Hal ini penting dalam konteks Indonesia, di mana wacana keagamaan sering kali beririsan dengan isu toleransi, minoritas, dan legitimasi negara terhadap ekspresi keagamaan tertentu. Studi Agama yang reflektif secara epistemologis berpotensi berkontribusi pada wacana publik yang lebih inklusif dan dialogis.

Dari perspektif metodologis, hasil kajian ini menunjukkan perlunya penguatan pendekatan interdisipliner dalam Studi Agama Indonesia. Pendekatan sejarah, antropologi, sosiologi, dan kajian budaya menjadi krusial untuk melengkapi analisis normatif-teologis yang selama ini dominan. Dengan demikian, Studi Agama tidak lagi berfungsi sebagai penjaga definisi agama, melainkan sebagai ruang analisis kritis terhadap bagaimana agama diproduksi, dipraktikkan, dan dimaknai dalam konteks sosial tertentu.

Secara keseluruhan, implikasi kritik anti-esensialis menegaskan bahwa pengembangan Studi Agama di Indonesia membutuhkan pergeseran paradigma: dari pencarian esensi menuju pemahaman kontekstual; dari definisi normatif menuju analisis praksis; dan dari klaim universal menuju kesadaran pluralitas. Pergeseran ini bukan berarti menafikan dimensi normatif agama, melainkan menempatkannya sebagai salah satu ekspresi religius di antara banyak kemungkinan lain yang sama-sama layak dikaji secara ilmiah.

Tabel 1.

Perbandingan Paradigma Esensialisme dan Non-Esensialisme dalam Studi Agama

Aspek Analisis	Esensialisme Agama	Non-Esensialisme Agama
Pandangan tentang agama	Memiliki inti universal dan ahistoris	Konstruksi historis dan kontekstual
Fokus kajian	Hakikat, esensi, inti ajaran	Praktik, makna, dan pengalaman
Sumber otoritas	Pengalaman religius ideal / doktrin	Konteks sosial, historis, dan diskursif
Sikap terhadap keragaman	Variasi dari inti tunggal	Ekspresi religius yang setara
Risiko epistemologis	Reduksionisme, eksklusi	Relativisme (perlu refleksi kritis)
Relevansi bagi Indonesia	Terbatas, normatif	Tinggi, kontekstual dan plural

Kontekstualisasi dalam Studi Agama di Indonesia

Kritik anti-esensialis terhadap konsep agama memperoleh relevansi yang sangat kuat ketika dikontekstualisasikan dalam medan Studi Agama di Indonesia. Sebagai masyarakat yang ditandai oleh pluralitas agama, etnis, dan tradisi lokal, Indonesia menghadirkan realitas keberagaman yang tidak mudah dijelaskan melalui definisi agama yang bersifat tunggal, normatif, dan ahistoris. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan esensialis, yang masih dominan dalam wacana akademik dan kebijakan keagamaan, sering kali tidak memadai untuk membaca kompleksitas praktik religius di Indonesia.

Dalam banyak studi dan diskursus publik, agama di Indonesia kerap diperlakukan sebagai sistem ajaran baku yang memiliki inti normatif yang tetap. Pendekatan ini terlihat, misalnya, dalam cara agama diposisikan dalam pendidikan formal, regulasi negara, maupun dalam penelitian keagamaan yang menempatkan doktrin resmi sebagai titik rujukan utama. Akibatnya, ekspresi religius yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kerangka normatif tersebut seperti praktik keagamaan berbasis adat, tradisi lokal, atau

Islam kultural, sering kali dianggap sebagai “kurang murni” atau berada di pinggiran agama itu sendiri.

Dari perspektif kritik anti-esensialis, cara pandang tersebut merupakan problem epistemologis. Ia tidak hanya menyederhanakan realitas keberagamaan, tetapi juga menutup kemungkinan analisis kritis terhadap bagaimana agama dijalankan, dinegosiasikan, dan diberi makna dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks Indonesia, agama tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonial, dinamika politik nasional, serta interaksi yang panjang antara tradisi lokal dan agama-agama dunia. Oleh karena itu, memahami agama semata-mata sebagai sistem keyakinan normatif berarti mengabaikan dimensi sosial dan historis yang justru menentukan wajah keberagamaan Indonesia.

Pendekatan non-esensialis memungkinkan Studi Agama di Indonesia untuk membaca fenomena-fenomena tersebut secara lebih kontekstual. Agama dipahami sebagai praktik pemaknaan yang hidup (*lived religion*), bukan hanya sebagai seperangkat doktrin ideal. Dengan kerangka ini, praktik seperti tahlilan, slametan, ziarah makam, atau bentuk-bentuk keberagamaan lokal lainnya tidak lagi dilihat sebagai deviasi dari “agama murni”, melainkan sebagai ekspresi religius yang sah dalam konteks sosial-budaya tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan realitas empiris bahwa umat beragama di Indonesia sering kali menghayati agama melalui ritual, tradisi, dan relasi sosial, bukan semata melalui internalisasi doktrin abstrak.

Lebih jauh, hasil analisis menunjukkan bahwa kritik anti-esensialis juga penting untuk membaca relasi antara agama dan negara di Indonesia. Definisi agama yang bersifat esensialis cenderung memudahkan negara dalam melakukan kategorisasi, pengakuan, dan pengaturan agama. Namun, pada saat yang sama, pendekatan ini berisiko mengeksklusi ekspresi religius yang tidak sesuai dengan kriteria resmi. Dalam konteks ini, Studi Agama memiliki peran strategis untuk mengungkap bagaimana definisi agama bekerja sebagai instrumen kekuasaan, sekaligus menawarkan perspektif alternatif yang lebih inklusif.

Kontekstualisasi kritik Capps dalam Studi Agama Indonesia juga menuntut refleksi metodologis. Hasil kajian ini menegaskan bahwa penelitian agama di Indonesia perlu bergerak melampaui pendekatan normatif-teologis menuju pendekatan interpretatif dan historis. Metode etnografi, analisis wacana, dan sejarah sosial agama menjadi semakin relevan untuk menangkap dinamika keberagamaan yang cair dan berlapis. Dengan demikian, Studi Agama tidak hanya berfungsi sebagai arena klasifikasi agama, tetapi sebagai ruang kritis untuk memahami bagaimana agama beroperasi dalam kehidupan sosial.

Secara konseptual, konteks Indonesia menunjukkan bahwa esensialisme agama bukan hanya problem teoretis, tetapi juga problem praksis. Ketika satu model religius diperlakukan sebagai standar universal, maka potensi konflik, eksklusi, dan delegitimasi terhadap kelompok tertentu menjadi semakin besar. Kritik anti-esensialis, dalam hal ini, membuka ruang bagi Studi Agama yang lebih sensitif terhadap keragaman dan berkontribusi pada penguatan toleransi dan kohesi sosial.

Dengan demikian, kontekstualisasi kritik anti-esensialis dalam Studi Agama di Indonesia menegaskan perlunya pergeseran paradigma keilmuan. Agama perlu dipahami sebagai fenomena yang selalu terikat pada konteks sosial, budaya, dan sejarah tertentu. Studi Agama yang reflektif dan non-esensialis tidak hanya lebih akurat secara ilmiah, tetapi juga lebih relevan secara sosial dalam merespons tantangan keberagamaan di Indonesia kontemporer.

4. SIMPULAN

Posisi Konseptual Artikel

Artikel ini menegaskan bahwa persoalan agama dalam Studi Agama tidak dapat direduksi pada pencarian esensi tunggal. Fokus kajian dialihkan pada cara agama diproduksi, dipraktikkan, dan dimaknai dalam konteks sosial tertentu.

Temuan Utama

Analisis menunjukkan bahwa pendekatan non-esensialis lebih memadai untuk membaca kompleksitas keberagamaan, terutama dalam masyarakat yang plural dan historis. Agama dipahami sebagai proses pemaknaan yang dinamis, bukan sebagai entitas normatif yang statis.

Signifikansi bagi Studi Agama di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini membuka ruang pembacaan yang lebih inklusif terhadap praktik keagamaan yang beragam, tanpa menempatkannya dalam hierarki benar-menyimpang.

5. PERNYATAAN PENULIS

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan terkait penerbitan artikel ini. Penulis menegaskan bahwa naskah artikel bebas dari plagiarisme.

6. REFERENSI

- Alatas, S. F. (2006). *Alternative discourses in Asian social science*. Sage.
- Ammerman, N. T. (2014). *Sacred stories, spiritual tribes: Finding religion in everyday life*. Oxford University Press.
- Asad, T. (1993). *Genealogies of religion: Discipline and reasons of power in Christianity and Islam*. Johns Hopkins University Press.
- Azra, A. (2006). *Islam in the Indonesian world*. Mizan.
- Capps, W. H. (1995). *Religious studies: The making of a discipline*. Fortress Press.
- Eliade, M. (1959). *The sacred and the profane: The nature of religion*. Harcourt, Brace & World.
- Fitzgerald, T. (2000). *The ideology of religious studies*. Oxford University Press.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- McCutcheon, R. T. (1997). *Manufacturing religion*. Oxford University Press.
- Otto, R. (1958). *The idea of the holy* (J. W. Harvey, Trans.). Oxford University Press. (Original work published 1917)
- Schleiermacher, F. (1996). *On religion: Speeches to its cultured despisers* (R. Crouter, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1799)
- Smart, N. (1996). *Dimensions of the sacred: An anatomy of the world's beliefs*. University of California Press.
- Smith, J. Z. (1982). *Imagining religion: From Babylon to Jonestown*. University of Chicago Press.
- Turner, B. S. (2011). *Religion and modern society: Citizenship, secularisation and the*

state. Cambridge University Press.

Woodhead, L. (2011). Five concepts of religion. *International Review of Sociology*,
21(1),
121–143.